

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi membawa dampak terhadap pelayanan administrasi publik pemerintahan. Informasi dan Komunikasi yang semakin canggih mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada warganya , yang disebut dengan *Electronic Government* yang kemudian disingkat menjadi *e-Government* (Carter dkk., 2022). Penerapan *e-Government* dalam pelayanan pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat cukup mengakses layanan melalui internet tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, menerapkan *e-democracy*, dan meningkatkan transparansi untuk mencegah korupsi (Zhu & Kou, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* dapat memberikan kemudahan bagi

kedua belah pihak, baik pemerintah maupun warga negara, untuk memberikan dan menerima layanan pemerintahan dimanapun dan kapanpun (Twizeyimana & Andersson, 2019).

Penerapan *e-Governance* dalam pelayanan pemerintahan diterapkan di berbagai negara di dunia, baik negara di benua Asia maupun di negara-negara Uni Eropa (Al-Mushayt, 2019) . Penerapan *e-Government* di negara-negara anggota Uni Eropa semakin meningkat sejak pandemi COVID-19 dengan upaya peningkatan layanan digital sebagai sarana interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam layanan administrasi publik (Campmas dkk., 2022) . Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 27 negara di Eropa yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Kroasia, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol dan Swedia (Tutak & Brodny, 2022) .

Penerapan *e-Government* di negara-negara Uni Eropa sudah cukup berkembang. Namun implementasi *e-Government* memerlukan keterampilan dan minat yang tinggi dari masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemerintahan online berbasis *e-Government*, agar implementasi *e-Government* dapat terlaksana secara efisien (Doran dkk., 2023) . Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan kecanggihan digital dalam pemerintahan di negara-negara Uni Eropa meningkatkan transparansi dan mengurangi kasus korupsi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam meningkatkan transparansi pengendalian korupsi, Uni Eropa memanfaatkan kecanggihan *e-Government* dengan memiliki situs web EUR-Lex, situs web Transparency Register, dan situs web DORIE (Situs web resmi Uni Eropa, 2023), *Government Cloud*, *Data Embassy*, *e-Voting*, dan *e-Cabinet*. (Hodžić dkk., 2021) .

Selain hal tersebut, penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa dalam meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintah, Uni Eropa menggunakan *electronic*

Identity Card (eID) (Walke dkk., 2023) , Catatan Kesehatan Elektronik (EHR) (Stellmach dkk., 2022; Tosun dkk., 2022), website EU Open Data Portal (Duguay dkk., 2019), Infrastruktur Layanan Blockchain Eropa (Baldacci & Frade, 2021), dan *European Open Science Cloud* (EOSC) (Burgelman, 2021).

Namun dalam penerapan *e-Government*, kesenjangan digital juga dialami oleh Uni Eropa dan perlu melakukan promosi terkait penerapan *e-Government* kepada warga negara agar tidak terjadi kesenjangan digital dan partisipasi warga negara dalam urusan pemerintahan meningkat dan tercipta pemerintahan yang terbuka, transparan, dan kolaboratif (Cifuentes-Faura, 2022). Kesenjangan digital pada Uni Eropa diantaranya terjadi di Negara Bulgaria (Botrić & Božić, 2021), Rumania (Ivan & Cutler, 2021), dan Hungaria (Kiss dkk., 2020) yang dipegaruhi oleh factor usia, pendidikan, dan pendapatan (Anca dkk., 2021). Penelitian terdahulu tersebut juga diperkuat penelitan terdahulu lainnya yang menjelaskan bahwa faktor yang sama bahwa

kesenjangan digital di Uni Eropa di pengaruhi pekerja manual atau tidak bekerja, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, dan penggunaan internet yang sedikit (Vasilescu dkk., 2020).

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka, terlihat adanya gap yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat implementasi dan pengembangan *e-Government* di suatu negara tidak menjamin tingginya tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan *e-Government*. Pelayanan berbasis pemerintah di negara tersebut, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sehingga menjadi topik dan kajian yang menarik untuk dibahas. Memperbarui kajian pada penelitian ini, penulis akan fokus menganalisis pengaruh *E-government Development Index* (EGDI) terhadap *Wordwide Governance Indicator* (WGI) di negara-negara Uni Eropa (Rahmadani, 2021). *Wordwide Governance Indicator* (WGI) merupakan indikaor pengukuran tata kelola pemerintahan yang terdiri dari enam indikator yaitu *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Political Stability and Absence of Violence*,

Rule of Law, Regulatory Quality, Voice and Accountability (Darsono, 2022). Penelitian ini memanfaatkan software Smart PLS versi 0.3 dalam menganalisis data dan memperkuatnya dengan artikel ilmiah yang relevan (Ghozali, 2021) .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: apakah *E-government Development Index* (EGDI) di negara-negara anggota Uni Eropa berdampak pada *Worldwide Governance Indicator* (WGI) yaitu *Control of Corruption, Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, Rule of Law, Regulatory Quality, Voice and Accountability* di negara-negara anggota Uni Eropa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui dampak EGDI terhadap WGI di Uni Eropa.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dampak EGDI terhadap WGI di Uni Eropa, yang dapat digunakan sebagai referensi terkait dampak penerapan *e-Government* pada suatu negara

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi negara – negara Uni Eropa dalam meningkatkan kualitas EGDI serta menjadi referensi pada negara-negara lain khususnya pada neegara Indonesia dalam penerapan *e-Government* di Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban.